

## DIANGGAP BERHASIL TURUNKAN STUNTING, SULTRA TERIMA INSENTIF FISKAL RP5,3 MILIAR



Sumber gambar: *lintas21.com*

### Isi Berita:

Penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andap Budhi Revianto, menghadiri Rakornas Percepatan Penurunan Stunting yang dibuka langsung oleh Wakil Presiden, Ma'ruf Amin, di Jakarta (04/09/2024).

Rakornas ini merupakan langkah strategis pemerintah dalam menekan angka stunting di Indonesia, yang menjadi salah satu tantangan utama dalam sektor kesehatan. Rakornas diawali dengan laporan Menko PMK Muhadjir Effendy, yang juga sebagai Wakil Pengarah Program Percepatan Penurunan Stunting melaporkan angka prevalensi stunting di Indonesia telah mengalami penurunan sebesar 9,3% dalam lima tahun terakhir. "Stunting mencapai angka 30,8% pada 2018, saat ini angkanya 21,5% pada 2023," ujar Menko PMK.

Menko PMK menjelaskan upaya pemerintah meliputi pengadaan alat kesehatan, pemberian makanan tambahan, serta pelaksanaan intervensi secara serempak di berbagai daerah. "Perhatian khusus harus fokus diberikan untuk meningkatkan akurasi data, kualitas kader kesehatan, dan integrasi program, serta intervensi pada kelompok usia 6-23 bulan dan daerah yang prevalensi stunting masih tinggi," ungkap Muhadjir Effendy.

Saat Rakornas, diserahkan penghargaan dan insentif fiskal kepada daerah dan desa yang menunjukkan kinerja baik dalam upaya penurunan stunting serta yang berhasil menurunkan angka stunting secara signifikan.

Provinsi Sultra mendapatkan Insentif Fiskal dengan Kategori Kinerja Penggunaan Produk Dalam Negeri sebesar Rp.5.357.771.000,-. Acara selanjutnya, Wapres memberikan arahan kepada para peserta Rakornas. Ma'ruf Amin menegaskan stunting adalah isu krusial yang berdampak pada kualitas SDM Indonesia di masa depan, sehingga penanganannya harus terintegrasi dan berkelanjutan. Untuk keberlanjutan program ke depan, Wapres memberikan arahan kepada Pemangku Kepentingan terkait, sebagai berikut;

Pertama, ia meminta agar evaluasi program sebelumnya dijadikan sebagai masukan utama bagi perbaikan program ke depan. Kedua, Wapres menginstruksikan agar koordinasi lintas sektor terus diperkuat baik di pusat maupun daerah melalui pembagian peran yang jelas. Ketiga, Wapres meminta diseminasi pemahaman tentang stunting yang benar kepada masyarakat terus digalakkan. Menurutnya, sebagian masyarakat saat ini masih memiliki pemahaman yang keliru terkait stunting. Mengakhiri sambutannya, Wapres menyampaikan ucapan selamat kepada yang memperoleh penghargaan dan insentif fiskal atas kinerja, inovasi dan kontribusinya dalam pelaksanaan program penurunan stunting.

Dalam kesempatannya, Pj. Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto mengajak komitmen bersama dalam percepatan penurunan stunting di Provinsi Sultra. "Sesuai arahan Bapak Wapres, mari kita lanjutkan program dari tingkat provinsi hingga desa, memastikan bahwa program-program yang ada berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Saya mengajak komitmen kita bersama," tegasnya. Sebagai penutup, Pj. Gubernur Andap Budhi Revianto menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi dalam menangani masalah stunting serta mengajak seluruh elemen masyarakat Sultra untuk bersama-sama berkerja keras untuk membebaskan anak-anak Sulawesi Tenggara dari stunting. "Mari kita semua berkerja keras untuk bebaskan anak-anak Sulawesi Tenggara dari stunting," tegasnya. Rakornas ini dihadiri oleh Wakil Presiden RI, Kepala Staf Kepresidenan, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Kepala Lembaga, serta Kepala Daerah dari seluruh Indonesia.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://lintas21.com/baca/dianggap-berhasil-turunkan-stunting-sultra-terima-insentif-fiskal-rp5-3-miliar>, Dianggap Berhasil Turunkan Stunting, Sultra Terima Insentif Fiskal Rp5,3 Miliar, tanggal 4 September 2024; dan

2. <https://www.rri.co.id/stunting/953982/rakornas-bersama-wapres-pj-gubernur-sutra-komitmen-tuntaskan-kasus-stunting>, Rakornas Bersama Wapres, Pj Gubernur Sutra Komitmen Tuntaskan Kasus Stunting, tanggal 4 September 2024.

**Catatan:**

- Menko PMK menjelaskan upaya pemerintah meliputi pengadaan alat kesehatan, pemberian makanan tambahan, serta pelaksanaan intervensi secara serempak di berbagai daerah.
- Provinsi Sultra mendapatkan Insentif Fiskal dengan Kategori Kinerja Penggunaan Produk Dalam Negeri sebesar Rp.5.357.771.000,-.
- Terkait insentif fiskal diatur pada:
  1. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah:
    - a. Pasal 135 ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah dapat memberikan insentif fiskal kepada Daerah atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu; dan
    - b. Pasal 135 ayat (2) menyatakan bahwa Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja Pemerintahan Daerah, antara lain pengelolaan Keuangan Daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar.